

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BBM BAGI KELUARGA PENERIMAN MANFAAT (KPM) OLEH DINAS SOSIAL KOTA BATU

Selvi Yuriske Nia Albrina¹, Khoiron², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Indonesia*

Email : selviyuriske10@gmail.com

ABSTRAK

Kenaikan BBM memberikan dampak inflasi sehingga perlu adanya penekanan untuk mengurangi dampak inflasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan Nomor 134 tahun 2022 tentang pengimplementasian bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi. Penelitian ini didasarkan pada bagaimana berjalannya program BLT BBM yang di laksanakan di Kota Batu oleh Dinas Sosial. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan setiap permasalahan dan menganalisis realisasi yang sudah dilakukan pada penerapan BLT BBM di Kota Batu dengan menerapkan teori Grindle 1980 dan mengambil 4 komponen yakni : Pelaksanaan Program, Kepentingan Berpengaruh, Dampak dan Realisasi Program. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data yakni : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Ketepatan sasaran dinilai kurang tepat karena data yang kurang terupdate 2) Kepentingan berpengaruh yakni dari instansi yang terkait seperti Dinas Sosial dan PT.Pos sangat berdampak pada pengimplementasian BLT BBM 3) Realisasi BLT BBM kurang terealisasi karena masih banyaknya data yang tidak tersalur dan data bergabung pada data daerah Kabupaten Malang.

Kata Kunci : Implementasi, Program, BLT, KPM

Pendahuluan

Pada setiap permasalahan yang ada di negara pasti akan dilakukan analisis masalah untuk mendapatkan jalan untuk menanggulangi masalah. Pada September 2022 kenaikan BBM pada tiga bahan bakar yakni solar naik dengan harga Rp. 6.800, pertalite naik dengan harga Rp. 10.000 dan pertamax naik dengan harga Rp. 14.500 menjadikan pemerintah harus memberikan solusi pada masyarakat pengguna namun dengan keadaan yang kurang mampu. Penanggulangan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengeluarkan peraturan baru untuk menangani kenaikan BBM yang dapat menyebabkan inflasi di berbagai daerah. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2022 Nomor 134 menjelaskan bahwa alokasi bantuan sosial BLT sebagai pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi. Dana yang dialokasikan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Peraturan ini yang mendasari keluarnya program BLT BBM bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi fokus pemerintah dalam bantuan sosial yang akan dilaksanakan.

Pada masa kritis seperti ini pengimplementasian program dapat menjadi solusi utama dan cepat untuk segera menanggulangi masalah karena jika semakin lama penganggulan

terjadi maka masalah akan berdampak pada berbagai hal. Seperti yang dijelaskan Merilee S. Grindle (1980;7) pada bukunya “*implementation to be a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level*” dengan artian bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan administrator untuk menganggulangi masalah dengan pengeluaran program tertentu. Pengimplementasian tidak hanya semata-mata dapat menjadi solusi masyarakat namun juga harus melihat hasil yang dapat menjadi pengaruh besar dan baik pada setiap bidang.

Program BLT BBM yang di rancang menteri keuangan juga terlaksana pada wilayah Kota Batu. Pada pelaksanaan program BLT BBM Dinas Sosial Kota Batu menjadi tokoh utama pengawasan pelaksanaan program BLT BBM. Dinas Sosial Kota Batu menetapkan penerima BLT dengan didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan penerima tahap pertama yakni 8.744 dan penerima tahap kedua 9.544 yang terdapat pada 3 wilayah yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Penyaluran BLT BBM dilaksanakan pada dua tahap yakni tahap pertama pada (September-Oktober) sejumlah Rp.300.000 dan tahap kedua pada (November-Desember) sejumlah Rp.300.000.

Pada penyaluran BLT BBM tidak akan pernah luput oleh permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya di Kota Batu banyak permasalahan yang di alami setiap intansi yang berperan sebagai pelaksana program. Namun tidak pada intansi saja yang menjadi permasalahan BLT BBM masih banyaknya masyarakat yang protes hanya dengan alih-alih tetangga yang tidak mampu tidak mendapat sedangkan yang mampu mendapat. Ini yang menjadikan penelitian ini dilakukan karena ingin menjawab rasa keingin tauan mengapa masih banyak masyarakat yang protes akan hal-hal yang lebih mampu menerima sedangkan yang kurang mampu tidak menerima dapat dikatakan sebagai ketidak tepatan sasaran.

Melihat permasalahan BLT BBM yang sama dengan permasalahan yang dahulu dengan jawaban yang simpang siur membuat penulis penasaran dengan apa yang terjadi. Sehingga penulis menarik judul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Oleh dinas Sosial Kota Batu”** untuk melihat sendiri permasalahan dan pelaksanaan program BLT BBM di Kota Batu.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadikan program BLT BBM dinilai tidak tepat sasaran dan memiliki masalah dalam penyalurannya?
2. Apakah program BLT BBM dapat membantu perekonomian masyarakat (KPM) di Kota Batu?
3. Apakah realisasi program BLT BBM yang didistribusikan PT.Pos sesuai terget?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan pembagian BLT bagi keluarga penerima manfaat (KPM)
2. Untuk mengetahui pengaruh program BLT BBM bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu
3. Untuk mengetahui terealisasinya program sudah mencakup semua target atau masih banyak yang tidak tersalur dengan melalui PT. Pos Kota Batu

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Memberikan manfaat untuk penunjang atau penambah ilmu pengetahuan pembaca dan dapat menjadi pengevaluasian kebijakan baru oleh Dinas Sosial Kota Batu
2. Manfaat praktis
Diharapkan dapat menjadikan solusi, inovasi dan rekomendasi untuk Dinas Sosial ataupun PT.Pos dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program BLT BBM di Kota Batu.

Tinjauan Pustaka **Implementasi Program**

Dalam buku Grindle (1980;7) yang berjudul “Politics and Policy Implementation in the Third World” menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan administrator untuk menyelesaikan suatu masalah dalam publik dengan menggunakan suatu program tertentu yang sesuai akan permasalahan. Program ini dapat dikatakan sebagai kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah yang berdampak pada masyarakat dan menjadi pengaruh dalam kehidupan. Kebijakan publik juga harus melihat manfaat yang ada untuk menjadi suatu analisis kebijakan yang baru.

Pendapat Merille S. Gindle yang terdapat pada bukunya (1980;8) juga mengelompokkan bahwa implementasi di perngaruhi akan dua variabel. Yakni variabel kebijakan (content of policy) yang mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang di terima oleh kelompok sasaran
3. Sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Apakah sumber dayanya telah memadai

Variabel kedua yang ada dalam pendapat Grindle yakni variabel lingkungan implementasi (context of iplementation) yang mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Melihat pada cakupan variabel diatas implementasi kebijakan yang di kemukakan Grindle memiliki suatu tujuan dengan realisasi yang sesuai akan sasaran sehingga, program yang telah di buat oleh pemerintah akan berdampak dalam menyesejahterakan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai atau yang sering di singkat dengan BLT merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau program bantuan lainnya, baik yang bersyarat maupun tidak bersyarat. Program BLT dicetuskan pertama kali oleh Yusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Intruksi Presiden No.12 digalangkan program bantuan langsung tunai yang tidak bersyarat pada Oktober 2005 hingga Desember 2006. Kemudia program ini digalangkan kembali pada tahun 2008 berdasarkan Intruksi Presiden Indonesia No.3 tahun 2008 hingga 2013 dengan

berganti nama menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Pada kenaikan BBM bantuan langsung tunai atau BLT BBM di keluarkan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.134 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa alokasi bantuan langsung tunai seperti BLT sebagai pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi. Dana tersebut dialokasikan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Peraturan menteri keuangan dikeluarkan untuk menjadikan pegangan dalam melaksanakan program agar tidak terjadi penyelewengan.

Bantuan langsung tunai (BLT) BBM ini disalurkan menggunakan teknik penyaluran pada tahun 2008 yakni dengan tahap pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Departemen Sosial bersama elemen masyarakat, kedua verifikasi nama-nama penerima yang selanjutnya dikirimkan kepada PT.Pos, ketiga kartu penerima BLT di cetak sebagai undangan dengan kode atau barcode yang ada sebagai syarat pengambilan BLT BBM dan kemudian di berikan kepada wilayah/desa yang bersangkutan, keempat masyarakat dapat mengambil BLT BBM pada tempat yang sudah tertera dalam undangan dengan hari yang sudah ditentukan.

Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan keluarga miskin yang bersyarat dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki kriteria sebagai mana seperti keluarga PKH (Program Keluarga Harapan). Keluarga penerima manfaat masuk dalam DTKS ketika pada mas Covid-19 yang dinyatakan pada masa ini merupakan masa geting yang semua membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Keluarga penerima manfaat (KPM) dimasukkan melalui syarat tertentu yakni :

1. Kesehatan
Kesehatan mencakup ibu hamil yang mengandung dengan jumlah anak melebihi batas atau dalam kondisi menyusui dan anak usia dini yang belum sekolah dan perhitungannya menggunakan ulang tahun anak terkakhir.
2. Pendidikan Anak yang menempuh pendidikan berusia 6-21 tahun dengan menyelesaikan pendidikan wajib belajar dan kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan.
3. Kesejahteraan Sosial
Orang tua atau lansia dengan usia 70 tahun keatas yang tidak mampu bekerja atau terdapat dalam keluarga kurang mampu. Penyandang disabilitas yang tidak dapat melakukan kegiatan

sehari-hari dan hidupan bergantung pada orang lain.

Evaluasi Program

Program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi yang berlangsung dalam proses yang terkait dalam suatu organisasi atau intansi. Program memiliki 3 unsur penting :

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak dan berkesinambungan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Tujuan evaluasi program adalah untuk melihat pencapaian hasil dari program. Tujuan evaluasi program untuk melihat kendala dan kemajuan program agar dapat memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bong dan Taylor dalam Moleong (2013) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Tujuan pemilihan metode kualitatif ini adalah karena menitik beratkan pada pengumpulan data yang berkualitas dan digambarkan secara nyata dengan apa yang terjadi di lapangan.

Data pada penelitian ini merupakan fakta yang terjadi dalam lapangan yang didapat menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman (1984) bahwa aktivitas analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pembahasan

Ketidak Tepatan dan Masalah Dalam Penyaluran BLT BBM di Kota Batu

Menurut Grindle (1980) suatu program akan dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kepentingan berpengaruh. Pada penerapan program BLT BBM di Kota Batu pelaksanaan program ternilai cukup baik. Penilaian ini dapat dilihat dari semua intansi yang terkait bekerja secara maksimal dan bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing. Namun, meski terbilang cukup baik pelaksanaan program ini masih mengalami keterlambatan dalam penyalurannya seperti pada beberapa desa masih mengalami kemunduran akibat dari perubahan nomor induk PT.Pos Kota Batu.

Pada pelaksanaan program pasti akan melibatkan kelompok untuk menjalankan program

tertentu. Pada BLT BBM di Kota Batu pelaksanaan program melibatkan beberapa instansi dan pekerja sosial masyarakat. Pada setiap kepentingan berpengaruh inilah dapat dilihat dan menilai ketidaktepatan sasaran dan masalah yang di hadapi oleh setiap instansi. Adapun beberapa instansi yang terlibat atau menjadi kepentingan berpengaruh dalam BLT BBM di Kota Batu.

Dinas Sosial Kota Batu menjadi instansi pertama yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan program BLT BBM. Meski menjadi yang pertama Dinas Sosial mengalami permasalahan yang berakibat pada bawahannya atau instansi yang selanjutnya. Sebagai penyedia data penerima Dinas Sosial memberikan data dengan acuan pada data DTKS yang di ambil pada masa Covid-19. Data ini menjadi penilaian awal ketidaktepatan sasaran karena data penerima BLT BBM tidak sesuai akan harapan masyarakat dimana banyak masyarakat yang menilai bahwa keluarga yang mampu mendapat BLT BBM sedangkan yang kurang mampu tidak mendapat. Ini memang terjadi karena data DTKS yang berisi data semua masyarakat Kota Batu yang terdampak Covid-19 sehingga menjadi pengaruh awal dalam ketidaktepatan sasaran. Dinas Sosial sendiri tidak melakukan pemilahan pada data DTKS sehingga saat penyaluran masih banyak masyarakat mampu yang menerima.

PT.Pos Kota Batu sebagai pendistribusi utama dalam penyaluran program BLT BBM juga mengalami permasalahan. Pada PT.Pos permasalahan terjadi karena adanya pergantian nomor induk kantor. Pergantian ini dikarenakan Kota Batu merupakan kota yang terpecah dari Kabupaten Malang pada awal tahun 2002 sehingga administrasi Kota Batu harus pecah dari Kabupaten Malang. Namun pergantian ini tidak dilaksanakan secara langsung oleh PT.Pos sehingga pada penyaluran BLT BBM tahun 2022 PT.Pos mengalami kendala kemunduran jadwal pembagian yang diakibatkan dari pergeseran nomor induk kantor. Tidak hanya menjadikan keterlambatan data realisasi penerima PT.Pos menjadi campur dengan data 3 wilayah di Kabupaten Malang yakni Ngantang, Pujon dan kasembon.

Sistem aplikasi pembayaran yakni PGC (Post Giro Cash) yang dikelola PT.Pos juga berdampak pada penyaluran. Nomor induk kantor yang masih tergabung dengan Kabupaten Malang menjadikan pembayaran sistem PGC harus dilakukan di Kabupaten Malang sehingga perlu mengambil banyak waktu untuk melakukan pembayaran. Sistem PGC juga harus di alihkan ke Kota Batu dengan kurun waktu yang cukup lama sehingga juga perlu memverifikasikan data penerima dengan waktu yang lama.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga menjadi kepentingan berpengaruh dibawah naungan Dinas Sosial Kota Batu PSM dapat membantu dalam

penyaluran BLT BBM. PSM dapat mengambil alih ketika penerima hanya terdiri dalam satu orang di KK (kartu keluarga) untuk diberikan kepada ahli waris di KK yang berbeda. Ini dapat meminimalisir KK gaib yang pada statusnya terdapat penerima namun tidak ada yang mengambil. Ada penyebab KK gaib yakni lansia yang sudah di pecah KK dengan keluarganya atau seseorang yang kerjanya berpindah-pindah.

RT/RW juga menjadi kepentingan berpengaruh dimana RT/RW menjadi penyalur undangan yang diberikan oleh pihak desa kepada penerima. RT/RW juga menjadi pengumpulan data awal penerima yang dilakukan dengan pengumpulan KK. Namun masih banyak saja RT/RW yang curang dengan hanya mengumpulkan data KK beberapa orang seperti kerabat dekat atau teman-teman yang di inginkan saja. Ini juga menjadi awal ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT BBM.

Pengaruh BLT BBM Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Batu

Suatu program yang dikeluarkan pemerintah harus menjadikan manfaat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. BLT BBM yang dilaksanakan di Kota Batu dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam membantu kehidupan masyarakat. Pengaruh ini di lihat dari banyaknya masyarakat yang mengungkapkan bahwa BLT BBM dapat menjadi penambah pembelian BBM di kenaikan BBM. Tidak hanya harga BBM yang naik namun harga bahan pokok juga ada yang ikut naik. Sehingga masyarakat kadang kurang bisa mencukupi kebutuhan pokok mereka.

BLT BBM yang di ambil setiap dua pulan sekali dengan akumulais (September-Oktober) Rp.300.000 pada tahap satu di ambil di Bulan September dan pada tahap dua (November-Desember) Rp.300.00 yang di ambil pada Bulan Desember tahun 2022 ini sangat berpengaruh bagi masyarakat. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari ini dilihat dari masyarakat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat dapat membeli kembali BBM untuk transportasi ke sekolah maupun bekerja dan masyarakat dapat menjadikan bantuan BLT BBM sebagai uang saku anak untuk ke sekolah.

Target Realisasi BLT BBM yang Disalurkan PT.Pos Kota Batu

Pelaksanaan program tidak luput dari target sasaran. BLT BBM di Kota Batu memiliki target sasaran sekitar 18.288 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima BLT BBM. Data penerima BLT BBM dapat di rincikan dalam tabel berikut :

Tabel Penerima BLT BBM Tahap 1 & 2 Kota Batu

Pada data penerima di atas mengalami perbedaan dengan data realisasi yang diberikan PT.Pos Kota Batu. Terdapat selisih atau jumlah yang lebih banyak pada data realisasi. Jumlah data realisasi yang lebih besar ini diakibatkan dari adanya pergeseran nomor induk kantor PT.Pos yang masih bergabung dengan Kabupaten Malang. Sehingga terdapat tiga wilayah Kabupaten Malang yang tergabung dalam Kota Batu yakni Ngantang, Kasembon dan Pujon. Penerima di Kota Batu yang awalnya 18.288 keluarga KPM menjadi terealisasi 51.411 ini melebihi batas data penerima yang ada di Kota Batu.

Tabel Realisasi BLT BBM Kota Batu Oleh PT.Pos

Dari data realisasi terlihat masih terdapat sisa 1.166 keluarga KPM yang belum menerima BLT BBM. Tidak menerimanya BLT BBM ini diakibatkan adanya KK yang berdiri sendiri namun dengan status bahwa orang sudah meninggal, pergi jauh atau balik ketempat asalnya. Pemisahan KK ini biasanya dilakukan karena adanya pengguna BPJS dalam satu KK. Namun ada juga dengan alasan bahwa sudah tidak tinggal bersama orang tua sehingga banyak lansia yang memiliki KK sendiri dan tinggal sendiri di Kota Batu.

Realisasi BLT BBM di Kota Batu hanya sekitar 97,87% banyak alasan yang mempengaruhi ketidak capaiannya target BLT BBM. Dari PT.Pos sendiri terbilang bahwa ketidak tercapainya target karena adanya keterlambatan yang disebabkan dari pergeseran nomer induk kantor dan sistem aplikasi baru PGC (Post Giro Cash) yang harus di pelajari oleh PT.Pos secara cepat diwaktu yang singkat.

Meski banyak yang tidak tersalurkan PT.Pos Kota Batu selalu melakukan pelaporan dengan memisahkan KK yang tidak ada perimanya untuk menjadi laporan kepada Kemensos. Dan pada aplikasi PGC (Post Giro Cash) terdapat pelaporan dimana setiap penerima akan di foto dan langsung di aploud pada sistem aplikasi sehingga dapat langsung di akses Kemensos untuk menjadi bukti pelaporan PT. Pos Kota Batu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah teruraikan mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Oleh Dinas Sosial Kota Batu, maka di tarik kesimpulan di bawah ini :

1. Ketepatan sasaran dapat di pengaruhi oleh kepentingan kelompok yang menjadi pelaksana program. Ketepatan BLT BBM ini ternilai kurang tepat karena adanya permasalahan di setiap intansi yang menyebabkan terjadinya dampak negatif dari BLT BBM.

Penyaluran BLT BBM Kota Batu Tahap 1 & 2 Tahun 2022		
Kecamatan	Tahap 1	Tahap 2
Junrejo	2.037 warga	2.954 warga
Bumiaji	3.221 warga	3.435 warga
Batu	3.486 warga	3.155 warga
Total	8.744 warga	9.544 warga

2. Pengaruh BLT BBM bagi keluarga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dinilai sangat berpengaruh. Setiap warga yang mendapat sangat terbantu akan adanya BLT BBM. Pengaruh bantuan ini tidak hanya pada pembelian BBM yang

Data Realisasi Penerima BLT BBM Kota Batu Tahap 1 & 2 Tahun 2022		
Realisasi	Sisa	Presentase
51.411	1.166	97,87%

harganya melonjak tetapi berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dan menjadi penunjang pembelian BBM.

3. Realisasi BLT BBM di Kota Batu banyak mengalami kendala. Kendala ini berawal dari data DTKS, pergeseran nomer kantor PT.Pos dan banyaknya kartu keluarga yang berdiri sendiri tanpa ada pewaris dan perpindahan.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Oleh Dinas Sosial Kota Batu” maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki pelayanan atau kendala yang ada dalam pembagian BLT BBM dan bantuan apapun. Adapun beberapa saran tersebut :

1. Dinas Sosial Kota Batu seharusnya lebih rutin mengupdate data DTKS untuk menghindari ketidak merataan BLT BBM dengan bantuan organisasi PSM (pekerja sosial masyarakat) sebagai pekerja lapangan yang langsung di bawah Dinas Sosial.
2. Dinas Sosial Kota Batu juga harus memperhatikan KK (kartu keluarga) yang berdiri sendiri dan mengkonfirmasi melalui organisasi PSM. Agar semua bantuan BLT BBM atau bantuan apapun diterima dengan penerima dan tidak adanya pengembalian bantuan.
3. PT.Pos Kota Batu sebagai penyalur bantuan seharusnya lebih memperhatikan kembali hal-hal kecil seperti perpindahan nomor kantor dan sistem PGC (post giro cash) dan mengkonsepkan penyaluran seperti verifikasi data, validasi data dan penyaluran data dengan bantuan PSM (pekerja masyarakat sosial).

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Akib H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. Universitas Negeri Makassar. Vol 1 Nomor 1
- Grindle M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Pricenton University Press.
- Hardani (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Raco, J. R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : PT Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Rifan Aditya. (2021, January 17). Syarat dan Kriteria Penerima BLT PKH dan Cara Mendapatkannya. Suara.com; Suara.com.
- Rizal A. R. (2015) Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. Electonic Journal Muhammadiyah University of Makassar. Vol 1 Nomor 2

Undang-Undang

- INPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran [JDIH BPK RI]. (2017). Bpk.go.id.

PMK no. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun anggaran 2022

Website

- Badan Pusat Statistik.(n.d). Retrieved April 15, 2023, from <https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/04/04/1288/jumlah-pendudukmenurut-generasi-dan-kecamatan-di-kota-batu-2021.html>
- materibelajar. (2016). Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Menurut Para Ahli) - Materi Belajar. Materibelajar.id. [https://www.materibelajar.id/2016/03/impl](https://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html)
- Mela Arnani. (2022, September 22). BLT BBM 2022, Ini Dokumen dan Cara Mencairkannya di Kantor Pos. KOMPAS.com; Kompas.com. [https://money.kompas.com/read/2022/09/22/093311426/blt-bbm-2022-ini-dokumen-](https://money.kompas.com/read/2022/09/22/093311426/blt-bbm-2022-ini-dokumen-dan-cara-mencairkannya-di-kantor-pos)
- Profil.Dinas Sosial. (2023 April 14). From : <https://dinsos.batukota.go.id/profil/>
- Wikimedia Foundation. (2016, April 26). Bantuan Langsung Tunai. Wikipedia. Retrieved December 23, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai